

**PEMBANGUNAN
TRANSPORTASI TOL LAUT
DALAM MEWUJUDKAN**

INDONESIA YANG MAKMUR

**MENUJU POROS
MARITIM DUNIA**



A. Junaedi Karso

**PEMBANGUNAN TRANSPORTASI TOL
LAUT DALAM MEWUJUDKAN
INDONESIA YANG MAKMUR MENUJU
POROS MARITIM DUNIA**

A. Junaedi Karso



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PEMBANGUNAN TRANSPORTASI TOL LAUT DALAM
MEWUJUDKAN INDONESIA YANG MAKMUR MENUJU
POROS MARITIM DUNIA**

Penulis : A. Junaedi Karso

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Sakti Aditya, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-5896-45-8

NO HKI : EC00202201777

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Bismillahirrohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang “PEMBANGUNAN TRANSPORTASI TOL LAUT DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA YANG MAKMUR MENUJU POROS MARITIM DUNIA”.

Kami selaku penulis memohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutifipan atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait “Pembangunan Transportasi Tol Laut Dalam Mewujudkan Indonesia Yang Makmur Menuju Poros Maritim Dunia”.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, website, media serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Billahit taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 TOL LAUT BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Strategi Pembangunan Tol Laut Indonesia	2
C. Strategi Pembangunan Nawa Cita dan Tol Laut Indonesia .	3
D. Konsep Nawa Cita.....	4
E. Tol Laut	5
F. Posisi Strategis Indonesia	6
G. Tol Laut dan Kesenjangan Pembangunan.....	8
H. Manfaat dan Tantangan Berat Tol Laut	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Transportasi Laut	15
B. Jaringan Transportasi Laut.....	16
C. Pelabuhan.....	19
D. Moda Angkutan Laut	21
E. Tarif Angkutan.....	22
1. Angkutan Penyeberangan (ferry).....	24
2. Klasifikasi Rute Penyeberangan	26
3. Biaya Operasional Kendaraan (kapal)	27
F. Pentingnya Angkutan Laut	27
G. Gambaran Umum Tol Laut	29
1. Pelaksana Kebijakan Tol Laut.....	30
2. Sarana dan Prasarana Penunjang Tol Laut.....	31
H. Prosedur Penanganan Muatan Tol Laut	34
I. Jaringan Rute Tol Laut.....	35
J. Tarif Muatan Tol Laut.....	43
K. Realisasi Muatan Terangkut Tol Laut.....	43
BAB 3 PENGARUHNYA EVEKTIVITAS TOL LAUT	50
A. Nawacita Indonesia	50
B. Efektivitas Tol Laut	53
1. Pelabuhan dan Pemerataan Distribusi Barang	54

2. Konsep tol laut sistem <i>port to port</i>	59
BAB 4 TOL LAUT PENUNJANG PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA.....	64
A. Tol Laut Penunjang Ekonomi Indonesia.....	64
B. Misi Maritim.....	69
1. Teori Kekuatan Laut	71
2. Kegiatan Kemaritiman.....	81
C. Transportasi Laut.....	82
1. Rancangan Program Tol Laut	83
2. Realisasi Program Tol Laut	88
D. Kendala Pelaksanaan Tol Laut	90
BAB 5 TOL LAUT MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA	104
A. Indonesia Negara Kepulauan.....	104
B. Pembangunan Tol Laut	108
1. Kebijakan Tol Laut Indonesia	113
2. Konsep Tol Laut Indonesia	118
DAFTAR PUSTAKA	127
TENTANG PENULIS.....	140

BAB 1 | TOL LAUT BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA

A. Pendahuluan

Kemaritiman adalah peradaban dunia karena kepentingan negara-negara di dunia akan sangat ditentukan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan laut untuk kemakmuran maupun keberlanjutan bangsa-bangsa di dunia. Demikian pula Indonesia yang 70% wilayahnya berupa laut dan lautan perlu meletakkan arah pembangunan sebagai Negara Maritim. Nenek moyang bangsa Indonesia pernah mencapai abad keemasan sebagai negara maritim pada saat Kerajaan Mataram dan Sriwijaya serta kerajaan lainnya di Nusantara yang “menguasai laut” dari berbagai belahan bumi sehingga mendapatkan kemakmuran bagi rakyatnya dari laut melalui aktivitas ekonomi maupun perdagangan global dengan memanfaatkan laut. Zaman kejayaan maritim tersebut pudar pada masa penjajahan dan berimbas sampai sekarang orientasi pembangunan kurang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut sebagai sebuah kekuatan pembangunan yang mensejahterakan bangsa Indonesia.

Dalam mengembalikan kejayaan nusantara, Jokowi – JK mengusulkan pembangunan tol laut. Tol laut ini bukan jalan tol di laut. Tol laut adalah koneksitas laut dengan kapal-kapal besar dari Barat ke Timur, semua menghubungkan Indonesia secara cepat. Permasalahan bangsa selama ini yang sering sekali diangkat isunya adalah Pembangunan di Negeri ini yang tidak merata. Ada wilayah yang begitu tinggi tingkat kemajuan perekonomiannya dan ada daerah-daerah yang sangat tertinggal. Bahkan dalam dua Pemerintahan terakhir

BAB 2 | TINJAUAN PUSTAKA

A. Transportasi Laut

Menurut Miro (2005) secara umum transportasi adalah sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan – tujuan tertentu. Karena dalam pengertian di atas terdapat kata – kata usaha, berarti transportasi juga merupakan sebuah proses, yakni proses pindah, proses gerak, proses mengangkut dan mengalihkan di mana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Alat pendukung apa yang dipakai untuk melakukan proses gerak, angkut dan alih ini, bisa bervariasi, tergantung pada :

1. Bentuk objek yang akan dipindahkan tersebut.
2. Jarak antara suatu tempat dengan tempat lain.
3. Maksud objek yang akan dipindahkan tersebut.

Menurut Jinca (2011) sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai potensi wilayah yang tersebar dari Hinterland, dihubungkan oleh jaringan transportasi jalan ke pelabuhan, sistem transportasi laut (ke pelabuhan, pelayaran/perkapalan, dan potensi pergerakan barang) mempunyai peranan sangat penting. Pelabuhan sebagai titik-titik simpul jasa distribusi melalui laut dan sebagai pusat kegiatan transportasi laut, menyediakan ruang untuk

BAB 3 | PENGARUHNYA EVEKTIVITAS TOL LAUT

A. Nawacita Indonesia

Dalam janji kampanyenya pada pemilu 2014 silam, Presiden Joko Widodo memperkenalkan nawacita. Nawacita merupakan visi misi yang berisikan agenda-agenda pemerintahannya. Salah satu nawacitanya yaitu melakukan pembangunan Indonesia dalam bingkai negara kesatuan. Berangkat dari nawacita tersebut, Presiden Joko Widodo memperkenalkan konsep tol laut yaitu konsep pengangkutan logistik kelautan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di nusantara. Tujuan utama dari konsep tol laut adalah untuk menekan bahkan menghilangkan disparitas harga yang ada antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Dasar hukum tol laut adalah perpres nomor 106 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut. Tol laut sampai sekarang telah dilaksanakan selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Kendati demikian selama kurang lebih 4 tahun pengimplementasiannya, konsep tol laut dapat dikatakan belum berhasil dilaksanakan secara optimal. Masih banyak kendala-kendala yang terjadi dilapangan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tol laut itu sendiri. Kurang optimalnya fasilitas penunjang tol laut juga sangat berpengaruh terhadap distribusi barang logistik. Masalah selanjutnya adalah tidak efektifnya sistem tol laut yang mengusung konsep port to port dimana hanya masyarakat sekitar pelabuhan yang menikmati manfaat dari program ini, sementara masyarakat dipedalaman masih kurang merasakan dampaknya.

BAB 4 | TOL LAUT PENUNJANG PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

A. Tol Laut Penunjang Ekonomi Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga merupakan negara pantai (coastal state) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan (perairan) dan ruang udara (air space). Dua pertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah berupa lautan. Indonesia bisa juga disebut sebagai negara kepulauan (archipelagic state), dengan bukti 16.056 pulau tersebut. Kurang lebih 6 juta km² wilayah Indonesia berupa laut yang sangat mempengaruhi iklim dan cuaca seluruh wilayah. Dipandang dari sifat alami, maka lingkungan laut Indonesia memperlihatkan sifat integral antara unsur laut (air) dan darat (tanah). Secara ekologis, hal ini merupakan dasar ilmiah dan alami pula bagi konsep wawasan nusantara sebagai perwujudan kesatuan geografis, yang menjadi dasar kesatuan politis, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.⁹

Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia memiliki jalur perairan yang strategis untuk menghubungkan Asia Timur dan Asia Utara dengan Asia Selatan dan Afrika, serta Benua Australia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Jakarta Bina Cipta, 1987, hlm. 78.

BAB 5

TOL LAUT MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

A. Indonesia Negara Kepulauan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki luas wilayah kurang lebih 8.205.961 km², dengan jumlah pulau 13.466 yang sudah memiliki nama dan koordinat dan total panjang garis pantai 99.093 kilometer²⁰. Luas wilayah perairan Indonesia 6.315.222 km², dimana wilayah kedaulatan sebesar 3.374.668 km², wilayah perairan berdaulat sebesar 2.940.554 km², dan wilayah daratan sebesar 1.890.739 km²¹.

Dengan wilayah air yang jauh lebih luas dibanding daratan, serta posisi silang yang strategis, sudah sewajarnya Indonesia secara fundamental menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi strategis untuk kesejahteraan bangsa dan menciptakan keamanan di kawasan sesuai dengan amanat

²⁰ <http://www.bakosurtanal.go.id/big-sediakan-data-dan-informasi-geospasial-untuk-mendukung-industri-bahari/> di akses tanggal 21 Desember 2021, pukul 10.40 WIB.

²¹ <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/peran-informasi-geospasial-dalam-pembangunan-indonesia-sebagai-poros-maritim> di akses tanggal 21 Desember 2021, pukul 10.41 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana A, Abdullah. P. (2002). *Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya diIndonesia* Yogyakarta, BPFE.
- Donkin, Robin A. (2003). *Between East and West: The Moluccas and the Traffic in Spices up to The Arrival of Europeans*, Britannia, Diane Publishing Company.
- Hadi, Sudharto P, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta
- Jerry H, Bentley, *Seascapes: Maritime, Histories, Littoral Cultures and Transoceanic Exchanges*, University of Hawaii press, Honolulu.
- Marry R, Brooks. (2009). *Liberalization Maritime Transport, International TransportForum*, Paris, Forum Paper.
- Sullivan, Arthur, Steven M. Sheffrin. (2003). *Economics: Principles in Action*. NewJersey. Prentice Hall.
- Suyono, RP. (2003). *Pengangkutan Intermodal Ekspor-Import Melalui Laut*, Jakarta, PPM.
- Touwen, Jeroen. (2001). *Shipping and Trade in The Java Sea Region: a Collection of Statistics on The Major Java Sea Port*, Leiden. KITLV Press.
- Prihartono, Bambang, dkk. 2015. *KONSEP TOL LAUT DAN IMPLEMENTASI 2015 – 2019*, Jakarta: Bappenas. Rahman, M Razi. 2019. *Pengamat: Efektivitas tol laut tidak diimbangi sosialisasi memadai*.antaranews.com/berita LIPI. 2017. *Belum Efektif, Tol Laut Didorong Tidak Hanya Berdimensi Port to Port*. lipi.go.id/berita/belum-efektif-tol-laut-didorong-tidak-hanya-berdimensi-port-to-port/18928.

- Undang Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut).
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.
- Konvensi Hukum Laut 1958. Konvensi Hukum Laut 1982. IMO. Dephub DIPL, 1972, "Instruksi Umum Pengawasan Kapal", 1972, Jakarta. Dephub DJPL, 1972. Peraturan Bandar 1952, Jakarta.
- Perpres No. 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan barang Kebutuhan Pokok dan Penting Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 57/M/DAG/PER/8/2012

TENTANG PENULIS



A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasioal tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera*, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang*, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); *Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar*, (Jurnal MODERAT, 2019); *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar*, (Journal of Government and Civil Society, 2019); *Peran Humas dalam Menyebarluaskan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan *Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI*, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain *Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty*, (*International Jurnal of Social Science Humanities Research*, 2019); dan *Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency*, (*IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research*, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain *Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia*, (*East African Scholar Journal of Economics, business and Management*, 2019); *Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand*, (*International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus)*, 2020); *Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia*, (*Journal L Sociale*, 2020); *Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency*, (*Journal La Bisecoman*, 2020); *Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports*, (*South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences*, 2020); *Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia*, (*East African Scholar Journal of Education and Literature*, 2020); *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets*, (*Journal La Sociale*, 2020); *The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare*, (*International Journal of Mechanical and Production engimeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus)*, 2020); *Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex*, (*Artech Journsl of Art and Sosisl Sciences (AJASS)*, 2020); *Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective*, (*IAR Journal of Humanities and Social Sciences*, 2020); *Village Fund*

Management: Risks in Management of Village-Owned Enterprises, (Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service through Digital Technology-based Licensing Service, (Solid State Technology Archives Available, 2020). - Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement rule <http://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa>, 2021)

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermediate One di PKBMN Jakarta tahun 1998, Intermediate Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain My Dreams Future Procurement Break Through di LPKN tahun 2020, Certificate Procurement Contract Legal Expert (CPCLE) di International Federation of Procurement Bar Association (IFPB) tahun 2020, Certificate Procurement in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020, Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Blacklist dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun

2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Awareness, Understanding & Implementing Quality Management System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “*How to Perform While Transform*” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Quality

Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer (TOT) Internasional* di IPB-KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research (CIQnR)* di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research (CIQaR)* di Quantum HRM International_KAN tahun 2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, *Personal Expert Consultant* KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert

Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, [juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.](#)

Makassar, 18. September 2021
Hormat Kami,



A.Junaedi Karso



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202201777, 7 Januari 2022

Pencipta

Nama : **Dr. A. Junaedi Karso, S.H., MH., M.Si.**
Alamat : Dusun Kebon Randu, RT. 005/ RW. 001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indramayu, JAWA BARAT, 45256
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. A. Junaedi Karso, S.H., MH., M.Si.**
Alamat : Dusun Kebon Randu, RT. 005/ RW. 001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indramayu, JAWA BARAT, 45256
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Pembangunan Transportasi Tol Laut Dalam Mewujudkan Indonesia Yang Makmur Menuju Poros Maritim Dunia**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 6 Januari 2022, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000316985

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a/n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.